

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi
Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

NANDA SAHDA LESTARI

NPM 1946021008



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

Oleh

NANDA SAHDA LESTARI

Administrasi pemerintahan desa di Provinsi Lampung belum menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Mengingat kondisi demikian Pemerintah Provinsi Lampung menyusun program *Smart Village*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program *Smart Village* di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan anggaran tahun 2021 program *Smart Village* telah diimplementasikan di 130 Desa 78 Kecamatan 13 Kabupaten di Provinsi Lampung. Berdasarkan aspek program yaitu adanya tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sudah ada anggaran tahun 2021 sebesar 30 juta per desa untuk 130 desa lokus. Dan sudah adanya strategi yang dirumuskan dengan jelas. Aspek organisasi pelaksana yaitu pemahaman yang didapat sudah baik, tidak ada penolakan dari respon pelaksana serta intensitas yang tinggi dari organisasi pelaksana. Pada aspek kelompok sasaran belum adanya kegiatan dengan masyarakat bahkan sosialisasi terhadap masyarakat juga belum, sehingga tujuan dari program *Smart Village* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa secara efektif dan efisien belum tercapai. Faktor pendukungnya adalah anggaran dan dukungan dari pemerintah serta kolaborasi antar lembaga. Faktor penghambatnya adalah kurangnya kolaborasi antara kabupaten, kurangnya SDM di desa, area desa masih banyak yang *blank spot*, dan kurangnya ketersediaan ruang penyimpanan terhadap data program *Smart Village*.

Kata Kunci: Implementasi Program, *Smart Village*, Lampung

ABSTRACT

PROGRAM IMPLEMENTATION *SMART VILLAGE* IN LAMPUNG PROVINCE (Studies at the Office of Community, Village and Transmigration Empowerment Lampung province)

By

NANDA SAHDA LESTARI

Village government administration in Lampung Province has not implemented Information and Communication Technology (ICT). Given these conditions the Provincial Government of Lampung compiled a program Smart Village. The purpose of this research is to analyze the implementation of the program Smart Village in Lampung Province and to find out what are the supporting factors and inhibiting factors. This research is qualitative research with a descriptive type. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The results of the study show that based on the 2021 program budget Smart Village has been implemented in 130 Villages 78 Districts 13 Regencies in Lampung Province. Based on the program aspect, namely the existence of clearly formulated goals. The policies taken are in accordance with the objectives to be achieved. There is already a 2021 budget of 30 million per village for 130 locus villages. And there is already a clearly formulated strategy. The implementing organization aspect is that the understanding that has been obtained is good, there is no resistance from the implementer's response and the high intensity of the implementing organization. In the aspect of the target group there has been no activity with the community and not even outreach to the community, so that is the goal of the program Smart Village to realize community welfare through the use of information and communication technology in optimizing the management of village resources effectively and efficiently has not been achieved. Supporting factors are the budget and support from the government as well as collaboration between institutions. The inhibiting factor is the lack of collaboration between districts, the lack of human resources in villages, there are still many village areas blank spot, and the lack of availability of storage space for program data Smart Village.

Keywords: Implementation Program, *Smart Village*, Lampung

**IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi
Provinsi Lampung)**

Oleh

NANDA SAHDA LESTARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Nanda Sahda Lestari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1946021008**

Program Studi : **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Ismono Hadi, M.Si.
NIP. 19621127 198902 1 002

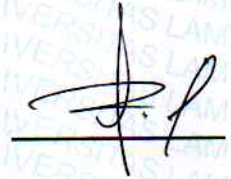
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.



Penguji Utama : Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Maret 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Nanda Sahda Lestari
NPM. 1946021008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nanda Sahda Lestari dilahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 27 Juni 2000, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari Bapak Holiq Ibrohim dan Ibu Rayati penulis memiliki dua orang adik perempuan bernama Khoirunnisa dan Aulia Nurul Hikmah.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Hujan Mas pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di Madrasah Tsanawiyah Walisongo pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning pada tahun 2018.

Tahun 2019, penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Penerimaan Jalur Paralel Universitas Lampung dan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah terlibat aktif menjadi Anggota Biro II Hubungan Luar dan Pengembangan Jurusan, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan. Selain itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2022 di Kecamatan Abung Barat, Desa Hujan Mas, Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, penulis juga melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama lima bulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

MOTTO

Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya.

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya 😊

(Nanda Sahda L)

Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.

(Al Isra: 7)

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

(Ridwan Kamil)

Jangan malas-malasan nanti nyesel di akhir

(Nanda Sahda L)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.
Semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayah dan Ibu tercinta

Holiq Ibrohim dan Rayati

Serta Adik-Adik perempuanku yang tersayang

Khoirunnisa dan Aulia Nurul Hikmah

Terima kasih atas doa serta dukungan yang telah diberikan.

Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan dan mendukung penulis,
semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM *SMART VILLAGE* DI PROVINSI LAMPUNG (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)”**. Tak lupa Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan

Kemahasiswaan dan Alumni;

6. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingannya selama ini yang sangat detail dalam mengoreksi skripsi penulis agar dapat menjadi skripsi yang lebih baik lagi . Terima kasih telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, dan ilmu yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP.,M.Si selaku Dosen Penguji yang telah banyak membantu memberikan arahan, waktu, motivasi, serta saran-saran yang positif dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ibu sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
9. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Bang Puput dan Mba Shela. Terima kasih sudah membantu penulis dalam hal administrasi perkuliahan selama ini.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Holiq Ibrohim dan Ibuku Rayati Terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu ada untuk penulis, pengertian, dan selalu mendukung hal positif yang penulis lakukan. Terima kasih yang terucap tak mampu membalas setiap doa serta dukungan demi membesarkan putri sulung tersayang. Semoga ayah dan ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT, diberikan rezeki dari berbagai sumber. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.
11. Kedua adikku Khoirunnisa dan Aulia Nurul Hikmah. Terima kasih sudah mendukungku dari awal hingga tahap ini. Semangat untuk adik-adikku dalam menyelesaikan sekolahnya. Semoga kita bertiga sukses serta dapat membanggakan kedua orang tua dan semoga kalian selalu dalam

lindungan Allah SWT. Aamiin aamiin aamiin yarobalalamin.

12. Keluarga besar H. Masoha. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
13. Muhammad Ridwan, terimakasih atas dukungan, kesabaran, motivasi, semangat, kritik dan saran, serta waktunya.
14. Sahabat-sahabat penulis sejak SMP yang hingga saat ini membersamaiku. Terima kasih Siti Annisyah dan Milenia Febi Santika atas segala doa dan dukungan kepada penulis.
15. Sahabat seperjuanganku, yang sejak mahasiswa baru sampai saat ini selalu saling mendukung. Terima kasih Irma, Nanda Arini, Widia N, dan Neha. Sanak Tiyuh, Amel, Nova Iko, Candra, dan Dika. Yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Semoga cerita dan *moment* yang telah dilalui di kampus maupun di luar kampus dapat menjadi pengalaman kita di masa depan nantinya.
16. Sahabat-sahabat penulis yang baru penulis temui 1 tahun yang lalu. Ghefin Nabila dan Viola Ika Tinori terima kasih telah menjadi salah satu bagian dari perjalanan hidup penulis dan terimakasih atas dukungannya selama ini. Semoga hubungan kita akan selalu terjalin.
17. Teman-teman seperjuangan MBKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
18. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa dituliskan satu persatu disini.
19. Narasumber penelitian, terima kasih untuk semua narasumber yang telah memberikan informasi dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian kepada penulis.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Terima kasih telah menerima saya dengan baik selama pelaksanaan PKL MBKM dan memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi dunia kerja.
21. *Last but not least, I want to thank me, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for not having a day off, I want to thank me for*

*your incredible patience, and it never stops to fight, I want to thank me
fordo not give upon what's hard.*

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya di bidang politik dan pemerintahan kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023
Penulis

Nanda Sahda Lestari

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Definisi Implementasi.....	10
2.2. Teori Implementasi	11
2.3. Kerangka Pikir	18
III. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Tipe Penelitian	20
3.2 Lokasi Penelitian.....	21
3.3 Jenis Data	22
3.4 Fokus Penelitian.....	23
3.5 Informan Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Pengolahan Data	28
3.8 Teknik Analisis Data.....	28
3.9 Teknik Keabsahan Data	30
IV. GAMBARAN UMUM.....	31
4.1 Gambaran Umum Program <i>Smart Village</i>	31
4.2 Tiga pilar <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	37
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Implementasi Program <i>Smart Village</i> Di Provinsi Lampung	40
5.1.1 Program.....	40
5.1.2 Organisasi pelaksana.....	48
5.1.3 Kelompok Sasaran	56
5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program <i>Smart Village</i>	74

VI. SIMPULAN DAN SARAN	77
6.1 Simpulan	77
6.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2022	3
2. Kondisi <i>Smart Village</i> di Lampung.....	5
3. Data Informan	24
4. Tim Kabupaten program <i>Smart Village</i>	49
5. Kelembagaan Terkait	51
6. Jumlah Pendataan Desa dan Kecamatan	60
7. Alamat Portal Utama Website <i>Smart Village (Dashboard)</i> Provinsi Lampung	62
8. Alamat Portal Website Desa Lokus <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Teori David C.Korten.....	13
2. Kerangka Pikir	19
3. portal website <i>Smart Village</i> Provinsi Lampung	63
4. Web Desa Way Lunik	66
5. Website Desa Semuli Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	67
6. Bimtek Program <i>Smart Village</i>	71
7. Wawancara dengan Bapak I Wayan Gunawan,SE Sekretaris Dinas PMDT Provinsi Lampung.	96
8. Wawancara dengan Bapak Saprul Al Hadi.S.STP,MM Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan DPMDT	97
9. Wawancara dengan Bapak Yohannes Sulistiono.S.E.M.M Kasi Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Dinas	98
10. Wawancara dengan Bapak Davit Kurniawan Kepala Tim Official <i>Smart Village</i> , Ibi Darmajaya	99
11. Wawancara dengan Bapak Fajar Bakti Kusuma Tim Official <i>Smart Village</i> , Ibi Darmajaya	104
12. Wawancara dengan Bapak Heru Marwanto Kasi Pemerintahan Desa Way Lunik	105
13. Wawancara dengan Bapak Fitriono Sekretaris Desa Way Lunik	106
14. Wawancara dengan Ibu Dwi Windari Kasi Pemerintahan Desa Semuli Jaya.....	115
15. SK Gubernur Lampung tentang <i>Masterplan</i> Program <i>Smart Village</i>	129
16. SK Gubernur Lampung tentang Tim <i>Smart Village</i>	130
17. Pergub no. 18 tahun 2021 tentang Program Desa Berjaya	131
18. SK Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program <i>Smart Village</i>	100
19. Petunjuk Pelaksanaan Operasional Program <i>Smart Village</i>	101
20. Laporan Tahunan Program <i>Smart Village</i> , 2022	101
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.....	101
22. Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2024.....	101

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi telah banyak digunakan dalam bisnis dan pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana sebuah desa berkembang dari segi ekonomi, pendidikan, dan pelayanannya. Pemanfaatan teknologi di pedesaan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan desa yang diberikan kepada masyarakat guna menghilangkan anggapan bahwa desa yang sering disebut sebagai desa pintar itu tertinggal secara teknologi. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka melahirkan kebijakan dana Desa dan menyebabkan peningkatan inovasi desa cerdas (*Smart Village*) secara signifikan.

Program *Smart Village* adalah salah satu dari kebijakan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim untuk mencapai Desa Berjaya, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu Rakyat Lampung Berjaya.

Program *Smart Village* Provinsi Lampung adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengubah Desa yang tidak mengenal teknologi menjadi Desa yang mengenal teknologi melalui digitalisasi. Program ini berfokus pada kesadaran sosial masyarakat di desa untuk peduli pada perubahan digital, dengan melibatkan semua *stakeholder* dan terintegrasi dari tingkat Desa hingga Provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi

ekonomi kreatif digital di Provinsi Lampung melalui sektor-sektor seperti agrikultur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, maritime, dan layanan publik (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024).

Smart Village adalah pengembangan dari konsep kota cerdas untuk memberikan solusi bagi masalah di wilayah pedesaan. Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat pedesaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya era digital. *Smart Village* tidak hanya fokus pada teknologi yang canggih, tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membantu pengembangan usaha kecil berpotensi, meningkatkan partisipasi masyarakat di desa, dan meningkatkan kualitas pelayanan di desa (Laksono, Chawa, dan Yuliati, 2020).

Karakteristik wilayah desa, budaya, masyarakat yang homogen, menjadi suatu alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak dapat disamakan dengan lingkup kota dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa (Herdiana, 2019).

Smart Village merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. *Smart Village* memberikan layanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dan kelompok swasta. Konsep *Smart Village* tidak hanya fokus pada optimasi teknologi informasi, tapi juga memperkuat investasi manusia dan modal sosial masyarakat, serta memenuhi investasi fisik (infrastruktur) desa.

Implementasi konsep *Smart Village* membutuhkan dukungan dari beberapa komponen untuk memberikan hasil yang positif dan maksimal. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan pedesaan merupakan tiga elemen utama yang membentuk *Smart Village* dan memiliki peran dan tugas yang berbeda. Elemen-elemen ini saling mempengaruhi dan membentuk komponen *Smart Village* seperti *smart government*, *smart community*, dan *smart economy*. *Smart government* adalah perkembangan dari *E-Government* yang menggunakan teknologi dan informasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, yang dapat diukur melalui kinerja pemerintah (Herdian, 2019).
Yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan;
2. Ketersediaan layanan publik dan sosial dan
3. Transparansi tata kelola.

Table 1. Status IDM Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Status IDM				
				Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Lampung Selatan	17	256	0	1	165	90	0
2	Lampung Tengah	28	301	0	0	138	147	16
3	Lampung Utara	23	232	0	2	194	36	0
4	Lampung Barat	15	131	0	0	21	63	47
5	Tulang Bawang	15	147	0	3	107	33	4
6	Tanggams	20	299	0	3	220	76	0
7	Lampung Timur	24	264	0	4	160	96	4
8	Way Kanan	15	221	0	2	155	54	10
9	Pesawaran	11	144	0	0	103	31	10
10	Pringsewu	9	126	0	0	32	82	12
11	Mesuji	7	105	0	9	51	45	0
12	Tulang Bawang Barat	9	93	0	0	64	28	1
13	Pesisir Barat	11	116	0	14	79	22	1
Jumlah		204	2435	0	38	1489	803	105

Sumber Tabel 1: Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung 2022

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2022 total 2.435 Desa dengan Desa Mandiri 105 desa, Desa Maju 803 desa, Desa Berkembang 1489 desa, Desa Tertinggal 38 desa, Desa Sangat Tertinggal 0 desa. Dengan menggunakan ukuran Indeks Desa Membangun (IDM), saat ini jumlah desa mandiri mencapai 105 desa atau 4,3% dari 2.435 desa se Provinsi Lampung. Perlu lebih banyak lagi desa-desa yang bisa mandiri, caranya adalah lewat program *Smart Village*.

Menurut konsep desa cerdas (*Smart Village*), desa-desa di Indonesia akan berubah menjadi lebih siap untuk menghadapi masa depan dengan bantuan dari internet sebagai sarana untuk mencapai kemajuan. *Smart Village* adalah suatu upaya pembangunan desa yang didasarkan pada penerapan teknologi tepat guna yang memungkinkan desa untuk mencapai terobosan dalam berbagai aspek pembangunan dan memenuhi kualifikasi untuk masuk dalam kategori Desa Mandiri. *Smart Village* juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Ini adalah cara untuk mewujudkan Desa Mandiri (Herdiana, 2019).

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program atau kegiatan *Smart Village* yang difokuskan pada upaya peningkatan literasi internet, layanan perpustakaan desa, digitalisasi pemerintahan desa, dan partisipasi atau e-partisipasi masyarakat desa. Tujuannya untuk membina dan mengawasi proses pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat desa menjadi lebih baik, partisipatif, terkendali, dan akuntabel.

Gagasan di balik *Smart Village* adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa sekaligus meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah desa juga dapat memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan membangun konsep *Smart Village*. Agar dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya desa dalam rangka memfasilitasi dan

memberikan pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat dengan lebih baik.

Penerapan pelayanan publik berbasis digitalisasi harus diterapkan di desa, sebagai wujud *good governance* di pemerintahan desa. Menurut Yohanes Sulistiyono SE, MM, Kepala Bidang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas PMDT Provinsi Lampung, ia mengatakan bahwa ketika perbaikan layanan pemerintah telah dilakukan, maka akan mendorong peningkatan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Table 2. Kondisi *Smart Village* di Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kategori Data Wilayah OTDA			Jumlah Desa+Kel	Desa Lokus
		Kecamatan	Desa	Kelurahan		
1	Lampung Barat	15	131	5	136	7
2	Tanggamus	20	299	3	302	7
3	Lampung Selatan	17	256	4	260	18
4	Lampung Timur	24	264	0	264	7
5	Lampung Tengah	28	301	10	311	31
6	Lampung Utara	23	232	15	247	4
7	Way Kanan	15	221	6	227	5
8	Tulang Bawang	15	147	4	151	15
9	Pesawaran	11	144	0	144	12
10	Pringsewu	9	126	5	131	11
11	Mesuji	7	105	0	105	5
12	Tulang Bawang Barat	9	93	3	96	4
13	Pesisir Barat	11	116	2	118	4
14	Bandar Lampung	20	0	126	126	0
15	Metro	5	0	22	22	0
Jumlah		229	2.435	205	2.640	130

Sumber Tabel 2: Dinas PMDT Provinsi Lampung

Lampung merupakan salah satu Provinsi yang sudah mulai menerapkan konsep *Smart Village* sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart Village*. Dengan jumlah desa 2.435 dengan desa lokus 130 desa. Program *Smart Village launching* pada tanggal 25 Maret 2021 di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya program *Smart Village* diharapkan dapat

mempermudah pelayanan pada masyarakat mengenai administrasi kependudukan, surat menyurat dan perizinan. Selain itu dapat mempermudah promosi produk (UMKM) maupun kuliner dan promosi wisata desa.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi program *Smart Village* di Provinsi Lampung, karena berdasarkan apa yang ditemukan dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019–2024. Ada persoalan yang kemudian dikaitkan dengan implementasi *Smart Village* di Provinsi Lampung, yang dimaksudkan untuk menyederhanakan pengelolaan Kapasitas Desa dan Pemerintahan Desa dalam rangka memberikan pelayanan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang relatif rendah. Dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mesin dan kader kelembagaan masyarakat belum memadai, terbatas, dan kurang ideal. Hal tersebut kemudian dibarengi dengan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tepat guna sehingga menghambat peningkatan produktivitas kerja dan meningkatkan nilai tambah barang yang dihasilkan masyarakat.

Lalu persoalan ekonomi masih menjadi kendala dalam pengembangan *Smart Village*. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada pembangunan ekonomi, khususnya sektor pertanian, hambatan kelembagaan reformasi pedesaan masih ada di organisasi petani seperti Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Dari permasalahan diatas peneliti melakukan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Smart Village* di Provinsi Lampung (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang program *Smart Village*, yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Kencono (2021) tentang "Penerapan *Smart governance* dalam *Smart Village* di Kelurahan Dlingo

Kabupaten Bantul." Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program *Smart Village* didukung oleh penerapan *smart governance* di Kelurahan Dlingo melalui tiga aspek: *public service, transparency, dan policy*. Pemerintah Kelurahan Dlingo memperluas infrastruktur TIK dan SID sebagai pelayanan publik yang lebih baik.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Irman Firmansyah dan Syaepudin (2018) tentang Model *Smart Village* Berbasis Teknologi Informasi dengan studi kasus Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan observasi lapangan dan analisis data non-statistik. Hasil penelitian ini menghasilkan website Surade.co.id sebagai arah pembangunan *Smart Village* berbasis IT, analisis tingkat perkembangan daya saing dengan adanya *Smart Village* berbasis IT (13,33% peningkatan pengunjung menghubungi pelaku usaha), dan strukturisasi untuk pengembangan strategi selanjutnya.
- 3) Herdiana (2019) melakukan penelitian dengan judul "Pengembangan Konsep *Smart Village* bagi Desa-Desa di Indonesia". Menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 elemen utama dalam *Smart Village: smart government, smart community, dan smart environment*. Variabel-variabel ini membentuk *Smart Relationship*, yaitu sinergi antar variabel yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Smart Village* juga digunakan untuk pemberdayaan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dilihat dari Metode penelitian, Maharani dan Kencono (2021) menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data dari wawancara dan dokumentasi, Irman Firmansyah dan Syaepudin (2018) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian observasi lapangan dan analisis data non-statistik, dan Herdiana (2019) menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti sebelumnya mengidentifikasi program *Smart Village* sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan desa mandiri. penulis seperti Maharani dan Kencono (2021) dan herdiana (2019) menjelaskan keberhasilan program *Smart Village* didukung oleh elemen *smart governance*. Irman Firmansyah dan Syaepudin (2018), program *Smart Village* sebagai arah pengembangan daya saing berbasis IT. Penelitian ini akan menekankan bagaimana keberhasilan implementasi program *Smart Village* dengan menggunakan 3 aspek yaitu program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

- 1.2.1. Bagaimana implementasi program *Smart Village* di Provinsi Lampung dari aspek program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran?
- 1.2.2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan program *Smart Village*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi program *Smart Village* di Provinsi Lampung dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan implementasi program *Smart Village*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian memberikan kontribusi pemikiran tentang pengelolaan pemerintahan desa melalui program *Smart Village* untuk mewujudkan *good governance*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pemberdayaan Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai implementator dari Program *Smart Village*, agar kedepannya penerapan program *Smart Village* lebih baik lagi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Implementasi

Menurut Usman (2002) implementasi melibatkan aktivitas, tindakan, atau mekanisme suatu sistem yang terstruktur dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi dalam pandangan Guntur (2004) melibatkan perluasan aktivitas yang memastikan kesesuaian antara tujuan dan tindakan dalam usaha mencapainya, dan membutuhkan jaringan pelaksana dan birokrasi yang berfungsi dengan baik.

Implementasi adalah sebuah ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan dengan cara menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap (Hamalik, 2007). Kegiatan agar dapat membawa perubahan positif bagi para pelaksana kegiatan tersebut yaitu fungsi emosi, kognitif, dan psikomotorik. Menurut Hamalik (2007) implementasi diartikan sebagai melakukan sesuatu ke dalam praktik atau menerapkan sesuatu yang berdampak. Dengan demikian implementasi adalah pelaksanaan suatu tugas yang menguntungkan pelaksana dan dilakukan dengan menerapkan suatu kebijakan atau inovasi dalam praktik untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan.

2.2. Teori Implementasi

Menurut Sabatier (dalam Akib dan Tarigan, 2008), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (Akib, 2010) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut T.B. Smith, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Akib, 2010). Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linier dan model interaktif (dalam Akib dan Tarigan, 2008). Pada model linier, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaksana.

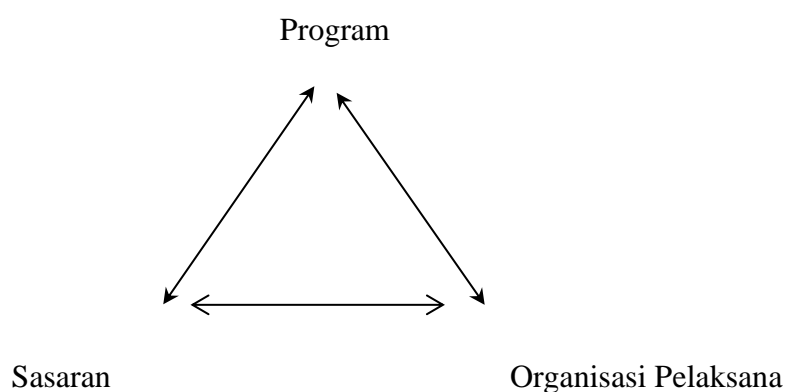
Berbeda dengan model linier, model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan stakeholders. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi dan proyek tertentu

yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu, enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle, selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan, juga menunjukkan kelebihan model tersebut dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, beserta output dan outcomenya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (Akib dan Tarigan, 2008) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.



Gambar 1. Teori David C. Korten

Sumber Gambar 1: Akib dan Tarigan, 2008

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas hasil tidak dapat dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian, elemen yang disesuaikan satu sama lain program, pemanfaat dan organisasi juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam

outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

David C.Korten menyatakan bahwa implementasi suatu program hanya akan sukses bila terdapat kesesuaian antara tiga faktor penting. Bila hasil program tidak sesuai dengan kebutuhan target *group*, hasil tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Bila organisasi pelaksana tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas program, maka mereka tidak akan dapat menyampaikan hasil dengan baik. Bila syarat program tidak dapat dipenuhi oleh target *group*, mereka tidak akan merasakan manfaat dari program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga faktor implementasi adalah kunci agar program berjalan sesuai dengan rencana. Adapun tiga unsur implementasi program menurut David C. Korten (dalam Akib dkk, 2008), yaitu:

1. Program

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Untuk itu, Indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek diantaranya:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

2. Organisasi pelaksana

Menurut Korten, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan (hasil program, tugas organisasi pelaksana, dan syarat kelompok sasaran) diperlukan untuk keberhasilan program. Keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana yaitu harus ada kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (Akib, 2010) bahwa terdapat tiga unsur yang mempengaruhi sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Unsur yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (1) pemahaman dan pengetahuan, (2) arah respon pelaksana terhadap implementasi atau menolak, (3) intensitas dari respon pelaksana.

3. Kelompok Sasaran

Menurut Korten, agar kelompok sasaran dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kebutuhannya, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana. Menurut Quade (dalam Nugroho, 2009), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik dari pandangan kelompok sasaran, yaitu:

- a. Tepat kebijakan atau program sejauh mana program yang ada telah memuat hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Kedua, program dirumuskan sesuai karakter masalah yang hendak dipecahkan. Ketiga, program dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakteristik program.
- b. Tepat pelaksanaannya artinya aktor implementasi sesuai dengan program yang akan dijalankan. Program pemberdayaan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah atau LSM bersama masyarakat.

- c. Tepat target berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak saling tumpang tindih. Kedua, target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Target mendukung implementasi program yang akan dilakukan. Ketiga, implementasi program bersifat baru atau memperbaiki implementasi program sebelumnya demi tidak mengulang program yang lama.
- d. Tepat proses artinya antara lembaga pelaksana dengan masyarakat saling memahami sebuah aturan main bahwa lembaga pelaksana menerima memahami dan melaksanakan program sebagai tugasnya sementara masyarakat menerima, memahami dan melaksanakan program.

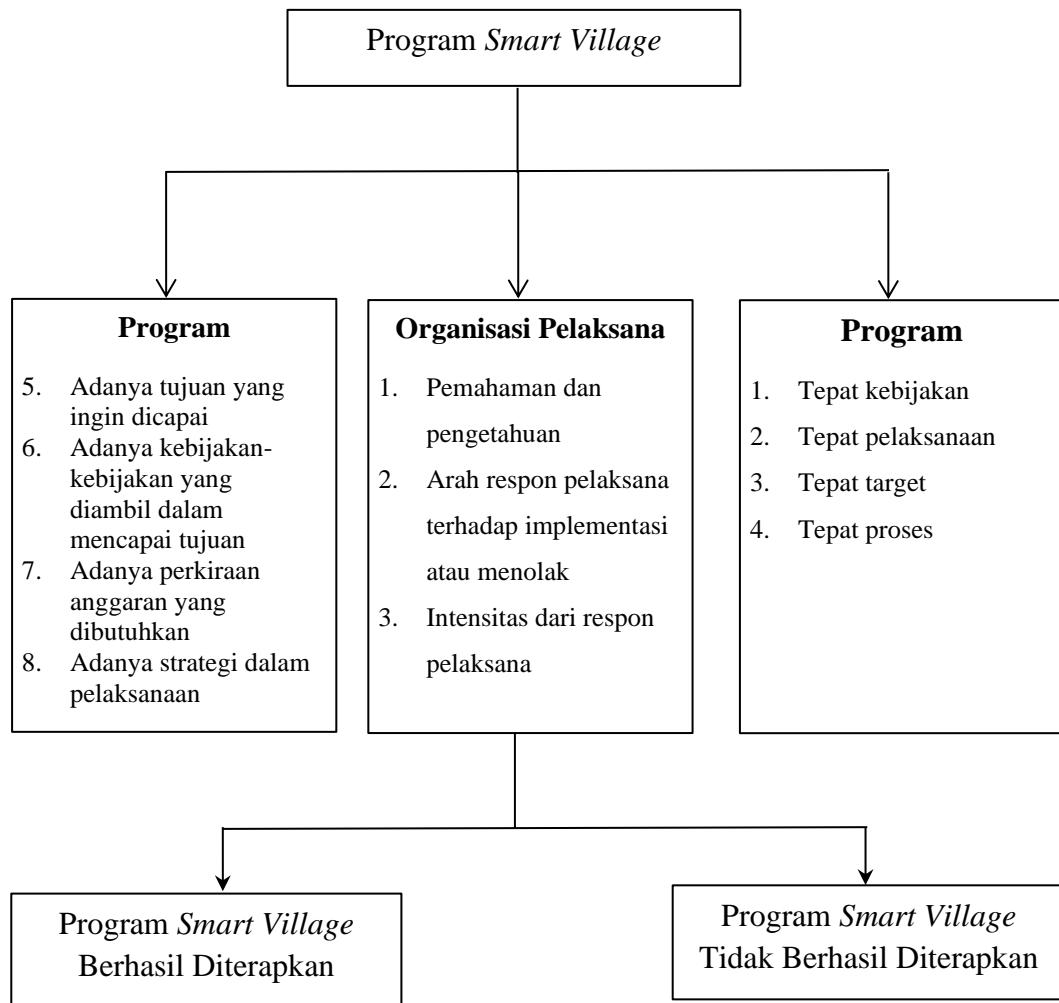
Implementasi akan berjalan lancar jika kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi tersebut meliputi keberadaan program yang menguntungkan sasarannya, ketersediaan sumber daya untuk menjalankan program, keberadaan lembaga yang mendukung kebijakan, dan sikap atau disposisi pelaksana. Dikarenakan ketiga komponen yang disebut oleh David C. Korten sebagai model kesesuaian sejalan telah dimasukkan dan tidak mengurangi isi faktor implementasi sesuai dengan ahli lain serta lebih mudah dipahami oleh peneliti, maka peneliti dalam penelitian ini memfokuskan lebih lanjut tentang penggunaan model implementasi ini. Selain itu alasan peneliti menggunakan teori ini karena menjelaskan beberapa variabel yang sesuai dengan penelitian ini. Dan teori ini juga sudah sering dijadikan referensi oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.36 Tahun 2020, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, adaptif, responsif dan mudah diakses masyarakat serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat diperlukan wadah atau penataan pelayanan yang terarah.

Namun dalam hal ini belum ada wadah yang memberikan kemudahan pelayanan maupun kebebasan masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kemudian dalam upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat khususnya masyarakat desa, pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan program berbasis *E-Government* yaitu *Smart Village*. Konsep *Smart Village* bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi setiap elemen di desa, baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri.

Selain itu, pemerintah desa di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan dalam upaya menjalankan program *Smart Village*, termasuk tantangan baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Untuk memastikan apakah variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi program *Smart Village*, maka dilakukan penelitian ini. Dengan menggunakan 3 unsur teori menurut David C.Korten yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran.



Gambar 2. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan pendekatan post positivistik dan interpretatif, karena memfokuskan pada interpretasi data yang dikumpulkan dalam lingkup yang kreatif dan tidak terlalu terpola. Menurut Sugiyono (2020), metodologi kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian pada situasi alami dimana peneliti adalah alat utama. Data dikumpulkan dengan menggunakan triangulasi dan analisis data bersifat induktif. Hasil penelitian menekankan makna dan lebih spesifik daripada generalisasi.

Menurut Anselm dan Juliet (2003), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan pada pemahaman makna dan melalui interpretasi data, menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara pengukuran lain. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan luas mengenai realitas sosial melalui sudut pandang partisipan. Hasil penelitian berupa pengetahuan umum dan abstrak tentang fakta-fakta yang ditemukan melalui analisis realitas sosial subjek utama.

Bogdan & Biklen (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pernyataan atau tulisan dan perilaku dari orang yang diamati. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dalam dan komprehensif tentang pernyataan, tulisan, dan perilaku seseorang, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam lingkungan konteks yang dikaji. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman umum tentang kenyataan sosial dari perspektif partisipan, yang tidak ditentukan sebelumnya, tetapi ditemukan melalui analisis kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif karena tipe penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam, pengembangan teori, pendeskripsian kompleksitas, dan realitas sosial. Sehingga tipe ini sangat relevan diterapkan di skripsi peneliti, yang mana skripsi ini mencoba mendeskripsikan realitas yang terjadi yaitu implementasi program *Smart Village*.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Alasan penulis memilih Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung karena Dinas ini yang memiliki dan menerapkan program *Smart Village*, maka akan lebih mudah untuk melakukan penelitian.

3.3 Jenis Data

Data primer dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata dan tindakan, sementara data sekunder adalah dokumen dan sejenisnya. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer memberikan data secara langsung dan sumber data sekunder memberikan data tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sumber data ini dapat diklasifikasikan sebagai jenis-jenis data, yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai implementasi *Smart Village* dari aspek program, organisasi pelaksanaan, dan kelompok sasaran serta kendalanya.

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara data dari buku-buku, karya-karya, jurnal, internet, literatur, dan dokumentasi terkait objek penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berupa materi *Smart Village*, dokumen

Smart Village, Peraturan Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yang diperoleh dari Dinas PMDT Provinsi Lampung serta kajian pustaka yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal sejenis.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiyono (2020) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang penulis pakai yaitu menurut David C.Korten dalam Akib dan Tarigan (2008):

1. Program
 - a. Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas
 - b. Adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
 - c. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
 - d. Adanya strategi dalam pelaksanaan
2. Organisasi Pelaksana
 - a. pemahaman dan pengetahuan
 - b. arah respon pelaksana terhadap implementasi atau menolak
 - c. intensitas dari respon pelaksana
3. Kelompok Sasaran
 - a. Tepat Kebijakan
 - b. Tepat Pelaksanaan
 - c. Tepat Target
 - d. Tepat Proses

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah individu yang memberikan data atau informasi yang terkait dengan objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dimana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling luas tentang topik yang diteliti (Sugiono, 2020). Mengutip dari pendapat Spradley dalam Sugiyono (2020) bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menarik untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Penentuan sampel sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yang bersifat sengaja (*purposive sampling*). Menurut Sugiyono (2020), purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel data yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu untuk mempermudah peneliti memahami situasi atau objek sosial yang akan diteliti.

Table 3. Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	I Wayan Gunawan,SE	Sekretaris Dinas PMDT Provinsi Lampung
2.	Saprul Al Hadi.S.STP,MM	Kepala Bidang Pemerintah Desa dan Kelurahan Dinas PMDT Provinsi Lampung
3.	Yohannes	Kasi Pengembangan Dan

	Sulistiono.S.E.M.M	Peningkatan Kapasitas Dinas PMDT Provinsi Lampung
4.	Fajar Bakti Kusuma	Tim Official <i>Smart Village</i> , Ibi Darmajaya
5.	Davit Kurniawan	Kepala Tim Official <i>Smart Village</i> , Ibi Darmajaya
6.	Fitriono	Sekretaris Desa Way Lunik
7.	Heru Mawanto	Kasi Pemerintahan Desa Way Lunik
8.	Dwi Windari	Kasi Pemerintahan Desa Semuli Jaya

Sumber Tabel 3: Hasil Wawancara, 2023

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian yaitu dengan menghasilkan data yang relevan. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, waktu, lokasi, aktivitas, peristiwa, objek dan tujuan. Observasi menjadi fondasi dari semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2020).

Jenis observasi adalah:

1) Observasi partisipan

Observasi partisipan adalah ketika orang yang melakukan observasi juga berperan atau berada di dalam situasi yang diamati. Sebaliknya, jika orang yang melakukan observasi tidak terlibat sama sekali dalam aktivitas yang diamati, maka disebut sebagai observasi non-partisipan.

2) Observasi Sistematis

Ciri utama dari observasi sistematis adalah adanya kerangka yang memiliki kategori-kategori faktor yang telah ditentukan, sehingga sering disebut sebagai observasi berkerangka atau observasi terstruktur.

3) Observasi Eksperimental

Observasi eksperimental adalah observasi yang mengendalikan unsur-unsur penting dalam situasi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian dan bisa dikendalikan untuk meminimalisir pengaruh faktor-faktor tidak terkontrol.

Dalam penelitian ini, pendekatan observasi partisipan dipakai oleh peneliti untuk melihat kejadian di lapangan secara alami, dengan cara mengunjungi lokasi studi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan salah satu desa lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung. Observasi dilakukan pada program *Smart Village*, organisasi pelaksana, dan kelompok sasarannya untuk memahami implementasi *Smart Village* dari segi program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasarannya.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah bentuk percakapan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak, pewawancara dan responden, untuk memperoleh informasi. Menurut Sugiyono (2020), wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan responden yang dilakukan melalui panduan wawancara.

Peneliti melakukan wawancara tak terstruktur dengan pegawai Dinas PMDT, seperti Sekretaris dinas, kasi pembangunan dan pengembangan, dan tim *Smart Village*. Alasan peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur adalah untuk membangun hubungan baik dengan responden,

sehingga membuat mereka merasa nyaman dan tidak merasa tertekan untuk menutup-nutupi informasi. Tujuannya agar jawaban yang didapatkan lebih alami dan tidak dipengaruhi oleh pewawancara. Dalam wawancara, peneliti mencatat hasil dengan menggunakan buku dan alat tulis.

Penelitian ini melakukan wawancara untuk memperoleh informasi tentang program *Smart Village*, mulai dari apakah sudah sesuai dengan rencana, kebijakan yang diambil dalam pembentukannya, bagaimana pelaksanaan program oleh organisasi, dan apakah kelompok sasaran yang ditunjukkan sudah tepat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data tentang implementasi program dan mengetahui kendala yang terjadi selama proses penerapannya.

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara peneliti mengumpulkan data melalui analisis dokumen seperti peraturan, buku, surat, majalah, catatan rapat, dan catatan harian. Dalam memperoleh informasi, peneliti mempertimbangkan tiga sumber informasi: orang, tempat, dan tulisan.

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan benda-benda tertulis seperti dokumen, handphone untuk merekam, dan buku untuk mencatat hal-hal penting. Peneliti sendiri berperan sebagai instrumen pengumpulan data melalui metode dokumentasi, dan menggunakan perekam gambar atau foto sebagai alat bantu. Sumber data yang digunakan meliputi hasil wawancara, laporan program *Smart Village*, SK *Smart Village*, dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2019-2024.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

3.7.1 Editing Data

Editing adalah proses memeriksa dan memperbaiki data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menghapus kesalahan dalam data dan menambahkan apa yang kurang. Proses editing melibatkan hal-hal seperti kelengkapan pengisian, kejelasan tulisan, kejelasan makna, konsistensi dan kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, dan keseragaman data.

3.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses untuk memahami makna dari data yang diperoleh dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Setelah data dikumpulkan dan dalam proses edit, peneliti menggabungkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu menganalisis dan membahasnya untuk memperoleh kesimpulan akhir.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Hardani (2020), pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif dalam menyajikan data. Miles dan Huberman (1992), psikolog perkembangan dan ahli pendidikan, menyatakan bahwa analisis kualitatif data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat, wawancara, dll dan diproses menjadi kata-kata dalam teks yang diperluas. Analisis kualitatif terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan menurut Miles dan Huberman (1992). Ketiga alur tersebut yaitu:

3.8.1 Reduksi Data

Analisis data melibatkan tahap reduksi, yaitu proses pembersihan, pengkategorian, pengarahannya, penghapusan data yang tidak perlu, dan pengaturan ulang data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat diverifikasi. Reduksi data mempermudah dan mentransformasikan data kualitatif melalui proses seleksi ketat, ringkasan, penggolongan data dalam pola yang lebih luas, dan lain-lain (Hardani dkk, 2020).

3.8.2 Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah tata letak informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk teks naratif adalah penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif di masa lalu, tetapi tidak teratur, berantakan, dan berlebihan (Hardani dkk, 2020).

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih sementara dan dapat berubah bila tidak didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika didukung oleh bukti valid dan konsisten saat pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan tersebut kredibel (Hardani dkk, 2020).

Penarikan kesimpulan adalah bagian integral dari proses penelitian, di mana kesimpulan terus-menerus diverifikasi seiring berjalannya penelitian. Makna yang muncul dari data harus diuji untuk kebenaran, konsistensi, dan relevansi, sehingga kesimpulan yang diperoleh berkualitas dan memiliki kegunaan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan dapat berupa deskripsi objek yang sebelumnya samar, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Hardani dkk, 2020).

3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk membuktikan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Helaludin dan Wijaya (2019), triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi dengan cara:

- (1) Mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui pengamatan, wawancara.
- (2) Kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti menggunakan prosedur membandingkan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika hasil wawancara, observasi dan dokumentasi satu dengan yang lain sesuai maka keabsahan data yang dipertanggungjawabkan. Namun jika hasilnya tidak sesuai maka peneliti melakukan hasil observasi sebagai sumber data.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Program *Smart Village*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 2, Republik Indonesia Terbagi menjadi Provinsi, dan Provinsi dibagi menjadi Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota dibagi menjadi Kecamatan dan Kecamatan dibagi menjadi Kelurahan/Desa, sehingga urusan pemerintahan di Daerah dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan dilakukan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan/Desa secara berjenjang.

Desa adalah unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional (Nursalam, 2018). Oleh karena itu, membangun Desa merupakan tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa. Dengan membangun Desa, akan memberikan dasar kuat bagi pembangunan nasional dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyediakan berbagai program untuk memperkuat peran Desa dalam mengelola sumber daya dan membantu tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu program pemerintah adalah menyelenggarakan Lomba Desa dan Kelurahan untuk menilai, mengevaluasi, dan mendorong pengelolaan potensi wilayah oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat bersama.

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan memadukan *self-governing community* (Komunitas Pemerintahan yang mengurus diri sendiri) dan *local-self government* (Pemerintahan lokal daerah). Dalam hal ini, pemerintahan desa tidak bisa berdiri sendiri tanpa partisipasi masyarakat. Pemerintah desa harus melakukan implementasi dalam kebijakan dan arah yang menguntungkan masyarakat. Terdapat 4 fungsi pemerintah desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Kushandajani, 2015).

Pemerintah desa bekerja dengan penuh untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Banyak desa memiliki situs web sendiri di mana masyarakat dapat melihat transparansi dan data desa, tetapi ini tidak diiringi dengan proses pembelajaran bagi masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan fitur yang tersedia karena sosialisasi yang tidak optimal. Masyarakat cenderung memilih metode konvensional dengan datang langsung ke desa jika ada kebutuhan. Dalam konteks *Smart Village*, penggunaan teknologi harus didukung dengan sosialisasi dan memberikan pemahaman teknologi kepada masyarakat. Pedesaan Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan pedesaan di negara maju. Jika sosialisasi berjalan dengan baik, teknologi informasi yang ada akan dapat beroperasi secara optimal dan pemanfaatannya dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi (Herdiana, 2019).

Program *Smart Village* merupakan kebijakan pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi permasalahan desa melalui aplikasi teknologi dan informasi. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh akses terhadap teknologi dan layanan modern, serta mempromosikan pengembangan usaha ekonomi berbasis teknologi.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, dan sektor akademis. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membangun infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet dan fasilitas informasi, untuk mempermudah akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi. Program ini juga fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan dalam menggunakan teknologi. Beberapa contoh aktivitas yang dilakukan dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi, serta membantu pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis teknologi.

Program *Smart Village* adalah sebuah program Gubernur Lampung yang bertujuan untuk membangun desa-desa yang lebih maju dan berdaya saing melalui implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bentuk program ini bisa berupa proyek pembangunan infrastruktur TIK, pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam menggunakan teknologi, hingga pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis teknologi (Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung 2019-2024).

Program *Smart Village* memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa secara efektif, efisien dan berkelanjutan dan juga mendukung kegiatan dalam pelaksanaan lomba Desa dan Kelurahan yang menjadi barometer kemajuan. Program *Smart Village* yang berbentuk website sebagai platform online yang dibuat untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh akses terhadap teknologi dan informasi, serta mempromosikan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis teknologi (Renstra Dinas PMDT Provinsi Lampung 2019-2024).

Di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terdapat beberapa fitur dan aplikasi yang dimiliki oleh program *Smart Village* antara lain:

- 1) Informasi teknologi dan layanan yang tersedia bagi masyarakat desa
Informasi mengenai teknologi dan layanan yang tersedia bagi masyarakat di desa-desa, mempermudah akses informasi dan komunikasi, dan membantu meningkatkan produktivitas, mempermudah pembuatan surat menyurat. Tujuannya untuk memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat desa terhadap teknologi dan layanan yang dapat membantu memperbaiki kualitas hidup mereka.

- 2) Wadah untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait
Untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi satu sama lain. Ini bisa berupa platform digital seperti forum atau grup diskusi online, atau sarana nirlaba seperti acara komunitas atau konferensi.

Wadah ini sangat penting dalam mempromosikan transparansi dan kolaborasi antar pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan bisnis. Berbagi informasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait melalui wadah ini mempermudah pemahaman dan sinkronisasi antar pihak terkait. Ini juga membantu menjaga kualitas layanan dan memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 3) Informasi tentang usaha-usaha ekonomi berbasis teknologi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa
Usaha ekonomi berbasis teknologi merupakan solusi yang baik bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Ada beberapa usaha yang dapat dikembangkan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan usaha ekonomi berbasis teknologi. BUMDes dapat

menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk berkolaborasi dalam menciptakan usaha ekonomi yang menguntungkan dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Beberapa contoh usaha ekonomi berbasis teknologi yang dapat dikembangkan oleh BUMDes adalah pertanian ter digital, pengembangan energi terbarukan, layanan kesehatan berbasis teknologi, dan *e-commerce* lokal. BUMDes juga dapat membantu memfasilitasi akses internet yang andal dan cepat bagi masyarakat desa, sehingga mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik.

Dengan memanfaatkan potensi teknologi, BUMDes dapat membantu masyarakat desa memperluas pasar dan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, BUMDes memegang peran yang sangat penting dalam mempromosikan pembangunan ekonomi berbasis teknologi di desa.

4) *E-voting*

E-voting untuk memilih Kepala Desa adalah sistem pemilihan Kepala Desa yang menggunakan teknologi dan internet sebagai platformnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pemilihan dan memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dalam sistem ini, warga desa dapat memberikan suaranya secara online melalui perangkat yang terkoneksi dengan internet, seperti komputer, laptop, atau ponsel. Sistem ini memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan transparan, akurat, dan efisien.

Keuntungan dari sistem *e-voting* Kepala Desa adalah mempermudah akses bagi masyarakat yang berada jauh dari desa atau tidak dapat hadir pada saat pemilihan, serta mengurangi risiko korupsi dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan transparan. Sistem ini juga

membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan, karena mereka dapat memberikan suaranya secara online tanpa harus datang ke lokasi pemilihan.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, sistem *e-voting* juga memiliki beberapa hambatan, seperti masalah teknis, akses internet, dan keamanan data. Oleh karena itu, implementasi sistem *e-voting* Kepala Desa perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor tersebut agar sistem dapat berjalan dengan baik.

5) *E-semdes* (Samsat Desa)

E-Semdes adalah aplikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah khususnya pajak kendaraan bermotor. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dan cepat. Aplikasi ini dikembangkan oleh pemerintah setempat dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan penggunanya dalam melakukan transaksi.

Dengan menggunakan *e-Semdes*, masyarakat tidak perlu repot-repot mengunjungi kantor pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Cukup dengan memiliki *smartphone* dan akses internet, masyarakat bisa melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor kapan saja dan di mana saja.

6) *Self Assessment* Desa (Penilaian Perkembangan Desa)

Self assessment desa merupakan aplikasi dengan metode pengkajian dan penilaian diri sendiri (dalam hal ini adalah Desa) yang dilakukan secara mandiri dengan mengidentifikasi masalah dalam tata kelola pemerintahan atau lembaga Desa lainnya yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya dan administrasi yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pemerintahan Desa. Aplikasi *Self Assessment* dibangun secara online yang berisi instrumen penilaian tata kelola Desa

dan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dapat mengakses aplikasi secara langsung (online) dan mengisi instrumen penilaian serta melihat hasil penilaian Desa dalam mengaplikasikan program *Smart Village* di Desanya.

4.2 Tiga pilar *Smart Village* Provinsi Lampung

4.2.1 *Smart Government*

Smart government merupakan suatu pengembangan dari *e-government* yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik. Membangun desa dengan konsep *Smart Village* tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi di suatu desa, tetapi ada hal yang lebih utama, yaitu lebih kepada bagaimana konsep ini mampu mengubah kondisi masyarakatnya menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran di masyarakat akan pentingnya sebuah inovasi.

Tujuannya untuk optimalisasi sistem pelayanan administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang prima dan terintegrasi baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Ini menjadi pilar utama dan pertama yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *e-goverment*.

Di Setiap desa akan dipasang sistem/aplikasi secara gratis yang dapat digunakan untuk pelayanan publik dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Aplikasi ini dapat digunakan secara online maupun offline. Dalam hal pelayanan publik, masyarakat dapat meminta pelayanan kepada pemerintah desa secara online melalui aplikasi yang

ada di handphone atau dengan fasilitas tap KTP di kantor desa dengan Standar Pelayanan Minimal yang Prima.

Sistem/aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal desa misalkan untuk menentukan objek PBB, pendataan penduduk tertentu, *e-voting*, *e-partisipasi* dan hal hal lainnya. Data base yang ada di masing-masing desa akan diintegrasikan dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota sampai Provinsi dimana masing-masing level akan dapat memanfaatkan data tersebut dan melakukan komunikasi data dengan level diatas atau dibawahnya.

4.2.2 *Smart Economy*

Smart economy merupakan suatu konsep tata kelola dalam perekonomian yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *Smart economy* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah terutama pedesaan agar dapat mengikuti tantangan di era disrupsi yang menuntut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya.

Tujuannya untuk mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa. Pelaku usaha di desa akan mendapatkan akses pengetahuan, pasar, promosi dan pembiayaan atas usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi dengan Portal *Smart Village* Lampung.

Dengan akses yang didapat tersebut, pelaku usaha akan efisiensi dalam produksi, penjualan dan distribusi, karena terjadinya layanan personal dan sesuai keinginan. Pelaku usaha lokal desa mendapatkan bimbingan

dan pendampingan dalam menjalankan usahanya yang akan dikolaborasikan dengan digital marketing. Keunikan budaya, seni, kuliner, dan kerajinan serta peran kaum muda di desa akan membentuk ekosistem ekonomi kreatif yang dapat menjadi kekuatan menuju dikapitalisasi agar permasalahan ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan dapat diatasi.

4.2.3 *Smart People*

Melalui program Inkubasi Desa, potensi yang ada di Provinsi Lampung dapat dikembangkan. Tujuannya adalah untuk menjadi salah satu penggerak pembangunan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia. Inkubasi Desa adalah proses untuk memperkuat dan mempercepat pengembangan usaha baru melalui berbagai program seperti pelatihan, pendampingan, mentoring, dan akses modal usaha yang berbasis digital.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Inkubasi Desa akan membentuk kelompok inkubasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan warga desa seperti aparatur, pemuda, pelaku usaha, dan masyarakat lain untuk melakukan inkubasi kepada BUMDES, UMKM, dan kegiatan ekonomi lain dengan membentuk *startup* dan usaha baru yang berbasis digital di desa masing-masing dan desa sekitarnya. Kelompok inkubasi desa akan menerima pelatihan khusus dari lembaga yang kompeten dan berpengalaman yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Lampung merupakan salah satu Provinsi yang sudah menerapkan Program *Smart Village* di 130 Desa 78 Kecamatan 13 Kabupaten sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksana *Smart Village*. Analisis implementasi program *Smart Village* berdasarkan tiga aspek yaitu: program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran.

- 1) Program. Program *Smart Village* Provinsi Lampung merupakan program pemerintah yang memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya desa secara efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kebijakan yang diambil jelas dan baik, kebijakan yang diambil yaitu SK Gubernur Lampung tentang penetapan lokasi sasaran *Smart Village* provinsi Lampung tahun 2020, Peraturan Gubernur No 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2021, SK Gubernur Lampung tentang Masterplan *Smart Village*, MoU Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan PT.Darmajaya Digital Solusi dan SK Gubernur Lampung tentang Tim *Smart Village*. Sudah ada Anggaran tahun 2021 yang berjumlah 30 juta per desa untuk 130 desa lokus. Strategi program *Smart Village* dilakukan dengan menyusun regulasi yang jelas, menyiapkan tim kerja yang terampil, melakukan kolaborasi dengan semua pihak terkait, dan memberdayakan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan serta meningkatkan literasi internet dan digitalisasi.

- 2) Organisasi Pelaksana. Tim *Smart Village* sudah memiliki pemahaman yang baik karena telah mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Respon pelaksana terhadap program *Smart Village* positif dan terbuka terhadap masukan dan saran. Implementator berkomitmen untuk membantu masyarakat desa dan berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program untuk memastikan keberhasilannya.
- 3) Kelompok Sasaran. Program *Smart Village* ini masih belum terealisasi dengan maksimal, dilihat dari program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah memiliki dasar hukum yang kuat dan terstruktur dengan baik. Pelaksanaan program *Smart Village* belum tepat dikarenakan belum adanya organisasi terhadap masyarakat sehingga tujuan dari program *Smart Village* untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya desa secara efektif dan efisien belum tercapai. Target dari program *Smart Village* adalah Desa/Pekon/Tiyuh/Kampung yang memiliki status IDM berkembang, maju, dan mandiri. Program *Smart Village* belum tepat prosesnya karena dilihat dari pelaksanaannya bahwa program ini belum sampai ke masyarakat sehingga masyarakat belum bisa memahami, melaksanakan dan merasakan manfaat dari program *Smart Village*.

Ada dua faktor pendukung program *Smart Village* yaitu Anggaran dan dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar lembaga. Anggaran dari Pemerintah dapat membantu melengkapi sarana prasarana serta fasilitas dalam rangka melaksanakan program *Smart Village*. Kolaborasi antar lembaga sangat membantu dalam keberlangsungan dari program ini. dukungan dari pemerintah dan kolaborasi antar lembaga juga merupakan faktor pendukung dari implementasi program ini. Terdapat 5 Faktor penghambat program *Smart Village* yaitu: (1) masih kurangnya kolaborasi antar kabupaten dan desa karena tidak semua kabupaten melihat program ini sebagai kerjasama. (2)

Masih kurangnya SDM di desa. (3) banyak desa desa yang *blank spot* (tidak ada jaringan internet). (4) berkurangnya ketersediaan ruang terhadap data di Provinsi karena semakin banyaknya desa yang menerapkan program *Smart Village*. (5) kurangnya dana untuk membayar perpanjangan web setiap tahunnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Program *Smart Village* di Provinsi Lampung” oleh Dinas Pemberdayaan, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dan Tim *Smart Village* sebaiknya mengadakan BIMTEK lebih lanjut mengenai program *Smart Village* yang bersifat merata dan berkelanjutan karena operator desa belum menguasai tentang program *Smart Village*.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebaiknya dalam penyampaian informasi atau Sosialisasi Program *Smart Village* perlu ditingkatkan baik frekuensi maupun jangkauannya.
3. Pemerintah provinsi sebaiknya memberikan anggaran tambahan untuk perpanjangan web desa, karena anggaran yang diberikan hanya cukup untuk pembelian sarana dan prasarana desa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebaiknya melakukan pendampingan kepada desa secara merata dan berkelanjutan terutama pada pemberian layanan terhadap masyarakat berhubung administrasi kependudukan, pemasukan berita, maupun pengembangan pada website desa.
5. Pemerintah Provinsi dan Dinas PMDT Provinsi Lampung perlu membuka kerjasama dengan pihak luar untuk mendorong pembangunan *Smart Village*, misalnya mendorong kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Supriadi. 2016. Membangun Sistem *Smart Village* Untuk Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa Mandiri Di Desa Alas Tengah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Berbasis Android. *Prosiding Sentia 2016. Volume 8*.
- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Akib, Header. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No. 1*.
- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal. Administrasi Publik. Volume 1 No. 1 Thn. 2010*.
- Anselm, Strauss dan Juliet ,Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Belajar ,Yogyakarta.
- Bahri. S & Sujanto.B & Madhakomala. 2020. *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. PT Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. 2019. Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoearth PWK FT UMMat e-ISSN 2615-4226. (4)2: 68-80*.
- Deikme, P. 2013. Motivasi Kerja Dan Budaya Organisasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3*.
- Firmansyah, I., & Saepudin.(2018). Model *Smart Village* Berbasis Teknologi Informasi (studi kasus Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Desa Volume 1 No.1 , 1-12*.
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu, yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Askara, Jakarta.

- Helaludin dan Wijaya, H. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Herdiana, D. 2019. Pengembangan Konsep *Smart Village* bagi Desa-Desa di Indonesia. *IPTEK KOM*, 1-16.
- Jusniaty., Asriadi, A, R., Jamaluddin, A., Abdullahi, A.B. 2019. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan *Smart Village* di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Prosiding KN-9 APPPTMA*, 369–378. Malang.
- Kushandajani, 2015, Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang. *Jurnal POLITIKA*, Vol. 6, No.2, Oktober 2015.
- Laksono, Nurfi Fuadi dan Chawa dan Yayuk, Yuliati. 2020. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 5 (4): 865–78.
- Maharani, E. N., & Kencono, D. S. 2021. Penerapan Smart governance dalam *Smart Village* di Kelurahan Dlingo Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(2), 25–38.
- Mahardika, P.A. 2018. Implementasi Kebijakan Smart Kampung Bidang Pelayanan Publik Di Desa Kampung Anyar. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Munir, D. 2017. *Smart Village: Desa Maju, Desa Bahagia*. APEKSI: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
- Ndoneews. 2020. Desa *Smart Village* di Era Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Retrieved from Indonews*.
- Nursalam, N. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Widya*, 2(1), 71-82.
- Pangalila, Y dan Kaawoan, J dan Kumayas, N. 2019. Implementasi Kebijakan Program gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tamohan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 3.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Desa Berjaya.
- Ramesh, B. 2018. Concept of *Smart Village* and it's Impact on Rurbanization. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 2(3), 1948–1950.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung tahun 2019-2024.
- Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2022.
- Saputro, H. 2016. Analisis Kesuksesan E-Government Menggunakan Success Model's Delone and Mclean (Studi Kasus: Pemerintah Kota Pekalongan). *Dissertation Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sarah, Arienne. 2017. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan (Studi Kasus Anggota Perempuan Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan). Skripsi. Jakarta: Jurusan pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, Jakarta. h.39.
- SK Gubernur Nomor G/71/V.12/HK/ 2021 tentang penetapan lokasi sasaran program *Smart Village* Provinsi Lampung tahun 2021
- Sudarto, Y. 2006. E-Government dan Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Baik. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia*, 44–47. Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.
- Taufiqurokhman. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. FISIP Universitas Prof.Dr.Moestopa Beragama, Jakarta Pusat.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Grasindo, Jakarta. h.170.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. PT Buku Kita, Jakarta.